

**PELAKSANAAN ANGGARAN UNTUK
PENANGANAN COVID-19 PADA DINAS
KESEHATAN KOTA BENGKULU**

Gusti Nadia Anjastanara
NPP. 29.1018
*Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
Program Studi Keuangan Publik*

Email: gustinadiaanjast@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : *The implementation of the budget for handling COVID-19 has been carried out well, however, there are still obstacles in its implementation, including the adjustment of new policies and the absence of technical instructions for its implementation. **Purpose :** The purpose of this study was to determine the implementation of the budget for handling Covid-19 at the Bengkulu City Health Office. Then to find out the inhibiting factors found by the Bengkulu City Health Office and to find out the efforts that have been made by the Bengkulu City Health Office. The research method used is descriptive qualitative **Method :** The method is, inductive data analysis and descriptive data presentation. The author examines based on phenomena or realities in the field. The data used are primary data in the form of interviews and documentation as well as secondary data. The informants selected by the researcher as a reference for appropriate and appropriate information in providing information about research related to the researched are the Head of the Health Service, the Secretary, the Head of the Finance and Assets Subsection, the Head of the Planning and Reporting Subdivision, the Public Service Sector and also the people who have been exposed to COVID. **Result :** The results showed that the implementation of the budget for handling Covid-19 at the Bengkulu City Health Office had run smoothly but there were still obstacles encountered in the field, including the absence of technical implementation instructions, adjustments to new regulations, weak human resources and education that vaccination is not dangerous. **Conclusion :** This have conclusion is found efforts to make it run smoothly in accordance with the objectives, among others, having to have technical instructions for implementation, coordinating the adjustment of new regulations, educating on the dangers of Covid-19, increasing knowledge or socialization of health workers and the importance of vaccination. **Keywords :** Implementation, Budget, and Covid-19*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Penulis berfokus pada Pelaksanaan anggaran untuk penanganan covid-19 sudah dilakukan dengan baik hanya saja masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya antara lain adalah penyesuaian kebijakan baru serta belum adanya petunjuk teknis pelaksanaannya. **Tujuan :**

Penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Anggaran Untuk Penanganan Covid-19 Pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Kemudian untuk mengetahui Faktor Penghambat yang ditemukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bengkulu serta untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bengkulu.

Metode : Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, analisis data bersifat induktif dan penyajian data bersifat deskriptif. Penulis meneliti berdasarkan fenomena atau kenyataan di lapangan, Data Yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan dokumentasi serta data sekunder. Informan yang dipilih peneliti sebagai acuan informasi yang sesuai serta tepat dalam memberikan informasi tentang penelitian terkait dengan yang diteliti yaitu Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris, Kasubbag Keuangan serta Aset, Kasubbag Perencanaan serta Pelaporan, Bidang Pelayanan Masyarakat dan serta masyarakat yang pernah terpapar covid.

Hasil/Temuan : Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran untuk penanganan covid-19 pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu sudah berjalan lancar tetapi masih ada kendala yang ditemui di lapangan antara lain.

Kesimpulan : Penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah Tidak adanya petunjuk teknis pelaksanaan, Penyesuaian terhadap peraturan baru, lemahnya SDM serta edukasi bahwa vaksinasi itu tidak berbahaya dan edukasi tentang bahayanya covid-19 serta telah menemukan upaya bagaimana agar berjalan lancar sesuai dengan tujuan antara lain harus memiliki petunjuk teknis pelaksanaan, koordinasi terhadap penyesuaian peraturan baru, Edukasi Bahayanya Covid-19, Meningkatkan pengetahuan atau sosialisasi terhadap tenaga kesehatan serta pentingnya untuk dilakukan vaksinasi.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Anggaran, dan Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sudah hampir dua tahun dunia diselimuti oleh wabah pandemi Covid-19. Sejak ditemukan pertama kali di Tiongkok, kasus Covid-19 makin menyuarak di seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali Indonesia. Indonesia yang masa-masa awal ditemukannya virus ini dianggap kebal, nyatanya juga wajib menerima kenyataan bahwasanya warga Indonesia akhirnya pun terinfeksi juga. Kasus Covid-19 di Indonesia beberapa kali sempat naik tinggi serta juga sempat melandai. Namun, secara garis besar, Indonesia sampai saat ini masih belum dapat pulih. Tingkat infeksi virus Covid-19 yang tergolong massive ini melumpuhkan segala aspek kehidupan, baik itu dalam bidang perniagaan, pendidikan, keagamaan, politik serta juga banyak lainnya. Mobilitas warga terpaksa wajib dibatasi demi menekan laju infeksi yang mulai sulit dikendalikan. Di Indonesia, pembatasan mobilitas warga dilaksanakan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta juga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan warga (PPKM) yang keduanya sama-sama dilaksanakan berulang kali. Tidak hanya itu, warga Indonesia juga mulai gencar disuntik vaksin yang mana oleh pemerintah digadang mampu menekan efek akibat terinfeksi virus tersebut. Jutaan dosis vaksin didatangkan dari berbagai penjuru. Anggaran dana yang disetujui adalah salah satu amanat yang penggunaannya wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Penggunaan dana haruslah jelas, wajib benar serta wajib tepat. Dana yang dikeluarkan wajib benar-benar demi kesejahteraan rakyat. serta yang dikeluarkan juga kelak akan dipertanggungjawabkan teruntuk warga

sebagai bentuk transparansi. Segala hasil akhir dalam kegiatan dapat dipertanggung jawabkan lewat terbukanya laporan pertanggung jawaban.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan program – program bantuan pemerintah bertujuan guna membantu warga dalam menghadapi kesulitan guna memenuhi kebutuhan hidupnya bagi warga yang masuk dalam kategori miskin. Dalam melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu membuat program sosial yang terkhusus dalam memberikan bantuan pangan. Perihal ini dilaksanakan sebagai bentuk menjalankan amanat Pemerintah Pusat guna turut mengatasi dampak-dampak yang timbul akibat adanya wabah ini. Tentu saja dalam pelaksanaannya memiliki bermacam kendala seperti terkait dengan penyesuaian terhadap peraturan baru yang diterima dalam kurun waktu yang singkat, tidak adanya petunjuk pelaksanaan kegiatan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahayanya *covid-19* dan pentingnya menjaga protokol kesehatan, lemahnya sumber daya manusia dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi pada masa pandemi ini sehingga menolak untuk melakukan vaksinasi. Mengingat besarnya amanat yang diemban dalam pengaplikasian dana tersebut, maka penulis tertarik dalam mengkaji lebih lanjut persoalan tersebut dengan spesifikasi mengenai **“Pelaksanaan Anggaran Untuk Penanganan Covid-19 Pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu”**.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks pembahasan Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi oleh D.N, Ridwan dan Kasim. Y pada tahun 2018 dengan hasil pembahasan tentang Di Kabupaten Sigi, pengorganisasian sudah dilakukan dengan baik. Hal ini mencakup job desk yang jelas sehingga bantuan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Pelaksanaan program BOK di puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi adalah mewujudkan rencana tersebut menjadi kenyataan ini berarti rencana tersebut dilaksanakan atau diaktualisasikan. Dana BOK diharapkan dapat digunakan diawal tahu namun pencairannya selalu terlambat. Selanjutnya penelitian terdahulu yang membahas tentang Analisis Anggaran Dan Realisasi Pada KPRI Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2015 oleh Ayudiasari. N.K.L, Atmadja. A.T, Yuniarta. G.A pada tahun 2017 yang hasilnya ialah Temuan berupa penyebab terjadinya kesenjangan anggaran yang terjadi 2013 hingga 2015 disebabkan oleh modal yang hanya memiliki satu sumber yaitu modal anggota saja. Faktor terjadinya kesenjangan anggaran pada tahun 2013-2015 yang pertama yaitu sumber permodalan pada KPRI kedua yaitu adanya peningkatan untuk beberapa akun biaya yang dikeluarkan KPRI Bhakti Husada. Selanjutnya penelitian terdahulu yang membahas Akuntabilitas Keuangan dalam penggunaan anggaran pengadaan obat dan perbekalan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang oleh Sri Puspita Sari pada tahun 2017 yang hasil temuannya ialah menunjukkan bahwasanya Akuntabilitas Penggunaan Anggaran kepada Pengadaan Obat serta Perbekalan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang secara keseluruhan sudah akuntabel, perihal ini dilihat dari penggunaan anggaran tersebut sudah memenuhi setiap komponen yang

menjadi penilaian, hanya saja di dalam program tersebut perlu dimaksimalkan lagi tujuan serta pemanfaatan penggunaannya. Penelitian Terdahulu yang ke empat membahas tentang Implementasi Kebijakan Pendistribusian Bantuan Darurat Dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Pasca Refocusing Kegiatan Pada Dinas Sosial Provinsi Aceh Tahun Anggaran oleh Tri setiadi Ismail pada tahun 2021 menggunakan metode deskriptif kualitatif serta hasilnya adalah 2020 Implementasi kebijakan Pendistribusian Bantuan Darurat dari Belanja Tidak Terduga Pasca Refocusing kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh berjalan sesuai dengan target namun dengan beberapa catatan yang menjadi pertimbangan agar kedepannya jika terjadi situasi darurat kembali pemerintah sepenuhnya siap melaksanakan kebijakan tersebut, dan penelitian terdahulu yang terakhir membahas tentang Implementasi *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Dalam Penanganan *Covid-19* Di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Andri hermawan pada tahun 2021 serta menghasilkan Implementasi Refocussing dan Realokasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Lombok Timur telah dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas yang ada di Lombok Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan serta Peraturan Daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian ini berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya Di tengah pandemi *Covid-19*, yaitu Pelaksanaan Anggaran Untuk Penanganan Covid-19 Pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Persoalan ini bukanlah satu perihal yang mudah mengingat keadaan semacam ini bisa dikatakan sebagai keadaan *extraordinary*, dimana hal-hal yang terjadi adalah perihal yang luar biasa dan berbeda secara signifikan dibandingkan keadaan lainnya, dan membutuhkan banyak perhatian serta penanganan khusus. Walaupun mengembalikan keadaan seperti sedia kala, setidaknya kegiatan yang tertunda dapat tetap dijalankan dalam keadaan apapun. yang dalam penelitiannya menggunakan variable analisis dan menggunakan metode kualitatif, menganalisis dana atau anggaran yang ada pada Dinas Kesehatan sehingga sasaran anggaran tersebut dapat sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan anggaran untuk penanganan covid-19 pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu ; untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan anggaran untuk penanganan covid-19 pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, dan ; untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dalam mencapai tujuan pelaksanaan anggaran untuk penanganan covid-19 .

II. METODE

Metode penelitian penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Diharapkan mampu menginterpretasikan hasil temuannya dan data-datanya dengan pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman yang dimiliki guna menghasilkan informasi yang amat berguna bagi perkembangan baik secara teoritik maupun praktik. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti wajib mampu menggali data-data yang terdapat dalam

lingkungan kehidupan, tingkah laku individu atau kelompok dan hubungan sosial dalam organisasi serta menganalisisnya hingga menjadi data yang akurat. Berdasarkan Denzin Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi serta dilaksanakan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari penjelasan di atas, dapat disintesis bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud guna memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan serta pengalaman lainnya. Berdasarkan perihal di atas peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sebab penelitian yang dilaksanakan bertujuan guna memahami apa yang terjadi dibalik fenomena yang kadang kala sulit dipahami serta lebih mudah menyesuaikan dengan kenyataan yang dihadapi dalam tempat kejadian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Anggaran Untuk Penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu

Sebagai dasar upaya penyelamatan ekonomi nasional di masa pandemi ini pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19. Surat Keputusan tersebut disusun berdasarkan atas keadaan yang memaksa Pemerintah dan lembaga terkait untuk segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN maupun APBD khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Selain itu pengelolaan anggaran dimasa pandemi Covid-19 diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19. Intruksi yang menjadi dasar dilakukannya pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi selanjutnya yaitu, dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19. Pelaksanaan realokasi dilakukan antara lain untuk pengadaan/distribusi obat buffer stock, alat/bahan pengendalian Covid-19, pengadaan APD ke RS yang menangani Covid-19, pengiriman alat kesehatan, pengadaan tes cepat Covid-19, sosialisasi/edukasi, pemeriksaan lab specimen Covid-19, tenda disinfektan, thermo scanner, sanitiser, masker, dan sarung tangan. Sedangkan mekanisme penghematan yaitu untuk belanja yang tidak terkait dengan penanggulangan Covid-19 dapat ditunda seperti perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, belanja non operasional, belanja barang, belanja modal khususnya proyek infrastruktur ditunda untuk dikerjakan multi years, kegiatan

proyek yang sudah dikontrakkan untuk dinegoisasikan lagi kepada pihak ketiganya untuk bisa ditunda pengerjaannya atau dikontraktualkan ditahun anggaran 2021. Pandemi covid-19 juga memberikan dampak meningkatnya jumlah penduduk yang kehilangan pekerjaan dan menurunnya tingkat perekonomian masyarakat, oleh sebab itu perlu dilaksanakan kebijakan terkait refocusing dan realokasi anggaran. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut merupakan stimulus untuk menjaga perekonomian masyarakat dan nasional. Hasil dari rasionalisasi anggaran kemudian yang digunakan untuk kepentingan masyarakat di tengah pandemi covid-19 ini.

3.2. Faktor Penghambat Yang Ditemukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Bengkulu

Berdasarkan Pelaksanaan Anggaran di atas masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan di lapangan sebagai berikut :

1. Penyesuaian terhadap kebijakan baru dimana kebijakan yang dikeluarkan dalam kurun waktu yang singkat Kondisi seperti ini merupakan kondisi baru sebesar Rp. 36.295.938.580,00 dari target pendapatan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Pendapatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum.
2. Tidak Adanya Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan terlebih dalam masa pandemi seperti ini semua kegiatan yang berkenaan dengan untuk penanganan covid-19 petunjuknya tidak ada karena ini merupakan hal baru dan masih harus dipelajari kembali dan melakukan perbaikan temuan apa yang terkendala dilapangan sehingga untuk penyempurnaan petunjuknya dapat segera dibuat, membuat penanganan covid-19 sendiri mengalami keterlamabatan.
3. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Bahayanya *Covid-19* dan Pentingnya Menjaga Protokol Kesehatan Ketidapatuhan warga terhadap penerapan protokol kesehatan sering terjadi di berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar ruangan. Bentuk pelanggaran yang jelas terlihat antara lain tidak menggunakan masker, menggunakan masker dengan cara tidak benar, dan beraktifitas atau berkumpul tanpa menjaga jarak fisik. Beberapa pelanggar bersedia menjalani sanksi yang diberikan, namun beberapa yang lain menolak dengan alasan melakukan pelanggaran secara tidak sengaja, misalnya karena lupa atau terburuburu. Persepsi hambatan (*perceived barriers*) menjadi salah satu penyebab ketidapatuhan karena diantara para pelanggar ada yang mengalami hambatan dalam memperoleh dan memahami informasi lengkap tentang *COVID-19*. Hambatan tersebut baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar (lingkungan). Warga yang bekerja sebagai pedagang, kuli panggul di pasar, kuli bangunan, kurir, dan buruh tani tidak dapat mengakses informasi secara leluasa. Bagi mereka kecepatan pelayanan kepada para pelanggan dan institusinya lebih utama daripada menghabiskan waktu untuk mengakses informasi tentang *COVID-19*. Hambatan lain juga dirasakan pelanggar yaitu peralatan komunikasi yang

digunakan karena masih terbilang sederhana dan kurang memadai untuk dapat mengakses informasi tentang COVID19.

4. Lemahnya Sumber Daya Manusia nya seperti Nakes yang membantu langsung masyarakat yang terpapar covid-19 dan tidak sedikit banyak juga nakes yang terpapar sehingga pelayanan dan penanganan terhadap kasus covid-19 terkendala. Sampai dicari relawan yang baru tamat sebagai perawat atau pun dokter untuk membantu penanganan pasien covid-19. Ditambah dengan belum adanya Standar Harga Satuan Biaya Honorium Tim Vaksinasi *Covid-19* di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021 terlambat diberlakukan karena jarak waktu yang terlalu lama. Rasionalisasi anggaran telah dilaksanakan, namun juknis penggunaan anggarannya harus membutuhkan waktu lama untuk diberlakukannya.
5. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi pada Masa Pandemi Ini Sehingga Menolak untuk Melakukan Vaksinasi Sejak pemerintah mengumumkan vaksinasi *Covid-19* di Indonesia, masyarakat telah dihadapkan dengan berbagai dilema pemberlakuan kebijakan ini. Melihat aktivitas masyarakat di media sosial media, masih ditemukan seruan kelompok yang menolak vaksin *Covid-19*. Bahkan, terdapat 49,9 persen dari total 601 responden menolak untuk menjadi penerima vaksin *Covid-19* pertama. Kajian dan riset yang dilakukan Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM yang diinisiasi oleh Amelinda Pandu Kusumaningtyas, Iradat Wirid dan beberapa peneliti senior CfDS.

33. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Bengkulu

Berdasarkan Kendala di atas dapat diambil upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bengkulu antara lain :

1. Melakukan Koordinasi Terkait dengan penyesuain peraturan baru yang diterima dalam kurun waktu yang singkat adalah berkoordinasi dengan perangkat Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dengan terus mempelajari peraturan tersebut secara bertahap terlebih dalam pelaporan penyesuaian anggaran untuk penanganan covid-19 ;
2. Menyediakan petunjuk pelaksanaan kegiatan terlebih ini baru pertama kalinya harus penyesuaian kembali dan tetap harus dibuatkan petunjuk dengan jelas agar semua rencana kegiatan terarah dan dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai. Sebuah kegiatan hendaklah memiliki petunjuk ataupun mekanisme dalam pelaksanaannya sehingga tidak melenceng dan tetap sesuai dengan tujuan utama. Terlebih kegiatan atau program banyak di pangkas lebih memprioritaskan kegiatan atau program untuk percepatan penanganan covid-19 itu sendiri.
3. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan salah satunya memberikan edukasi tentang bahayanya *Covid-19*. *COVID-19*

dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat. Sekitar 80% kasus dengan gejala ringan (pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam) dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Namun, sekitar 1 dari setiap 5 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Orang yang berusia lanjut, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung, paru-paru, atau kanker), mereka biasanya lebih rentan ;

4. Masalah SDM agar di upayakan lagi untuk mengadakan sosialisasi atau pun pembekalan terhadap para nakes dan yang paling penting adalah untuk insentif para nakes dan dokter harus tetap diupayakan kalau bisa ditambah sebagai apresiasi karena mereka adalah garda terdepan yaitu yang berhadapan langsung dengan pasien yang terpapar covid-19 sehingga berjalan seiring dengan yang hendak dicapai ;
5. Edukasi lain yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu adalah mengedukasikan tentang amannya vaksinasi. Berikut beberapa manfaat dari vaksin
 - a) Merangsang Sistem Kekebalan Tubuh
Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikkan ke dalam manusia, akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang.
 - b) Mengurangi Risiko Penularan
Tubuh seseorang yang telah disuntikkan vaksin, akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenai virus dan mengurangi risiko terpapar.
 - c) Mengurangi Dampak Berat dari Virus
Dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan.
 - d) Mencapai Herd Immunity
Semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka Herd Immunity akan tercapai, sehingga meminimalisir risiko paparan dan mutasi dari virus *Covid-19*

Berdasarkan penjelasan tersebut maka bisa dipahami bahwa Pelaksanaan Anggaran Untuk Penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu yang berhasil di capai di tahun 2020 adalah merupakan serangkaian proses panjang yang untuk penyusunannya harus dengan sinergi dan tanggung jawab oleh semua komponen di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Terlebih apalagi setelah diadakannya vaksin bagi masyarakat untuk mengurangi penularan covid- 19 di akhir 2021 keadaan sudah mulai membaik dan bahkan untuk kasus covid-19 sendiri makin hari makin menurun. Oleh sebab itu diperlukan penguatan bagaimana penanganan covid-19 yang terjadi di kalangan

masyarakat, perbaikan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi untuk hidup sehat, selalu menjaga jarak, mencuci tangan, tetap memakai masker dan yang paling penting mematuhi prokes yang baik dan benar. Pelaksanaan realokasi dilakukan antara lain untuk pengadaan/distribusi obat buffer stock, alat/bahan pengendalian Covid- 19, pengadaan APD ke RS yang menangani Covid-19, pengiriman alat kesehatan, pengadaan tes cepat Covid-19, sosialisasi/edukasi, pemeriksaan lab specimen Covid-19, tenda disinfektan, thermo scanner, sanitizer, masker, dan sarung tangan. Sedangkan mekanisme penghematan yaitu untuk belanja yang tidak terkait dengan penanggulangan Covid-19 dapat ditunda seperti perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, belanja non operasional, belanja barang, belanja modal khususnya proyek infrastruktur ditunda untuk dikerjakan multi years, kegiatan proyek yang sudah dikontrakan untuk dinegoisasikan lagi kepada pihak ketiganya untuk bisa ditunda pengerjaannya atau dikontraktualkan ditahun anggaran 2021.

34. Diskusi Temuan Utama

Dari temuan dan hasil penelitian penulis menemukan Pelaksanaan anggaran untuk penanganan covid-19 pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu sudah berjalan baik , masih banyak hambatan dan kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan anggaran. Beberapa hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terkait dengan Penyesuaian Terhadap Peraturan Baru yang diterima dalam kurun waktu yang singkat.
2. Tidak Adanya Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
3. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Bahayanya *Covid-19* dan Pentingnya Menjaga Protokol Kesehatan
4. Lemahnya Sumber Daya Manusia
5. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi pada Masa Pandemi Ini Sehingga Menolak untuk Melakukan Vaksinasi.

Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Pelaksanaan Anggaran untuk Penanganan Covid-19 Pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang harus diatasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai beberapa upaya yang diterapkan. Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi Terkait dengan penyesuain peraturan baru.
2. Menyediakan petunjuk pelaksanaan kegiatan.
3. Memberikan edukasi tentang bahayanya *Covid-19*.
4. Mengadakan sosialasi atau pun pembekalan terhadap para nakes.
5. Edukasi lain yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu adalah mengedukasikan tentang amannya vaksinasi

35. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Adapun beberapa temuan menarik yang dapat penulis berikan kepada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, di antaranya sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyempurnaan terhadap petunjuk teknis (Juknis) tentang penetapan dan penggunaan anggaran untuk penanganan covid-19.

2. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara lebih mendalam mengenai bahayanya covid-19 dan pentingnya mematuhi protokol kesehatan serta amannya pelaksanaan vaksinasi dengan metode *persuasive* dan *education game* dengan tema “You Are Smart and Healthy If You Come Play With Us”
3. Perlu adanya pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi mengenai pencapaian dari setiap program atau kegiatan vaksinasi.
4. Perlu adanya penjelasan tugas pokok dan fungsi bagian yang bertugas memeriksa pembaharuan kebijakan untuk membenahi lemahnya respon terhadap peraturan yang diturunkan pemerintah pusat.

IV. KESIMPULAN

Penelitian telah dilaksanakan penulis mengenai Pelaksanaan Anggaran Untuk Penanganan Covid-19 Pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Berdasarkan penelitian tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan dari fakta di lapangan dan meneliti berdasarkan data, bahwa :

Pelaksanaan Anggaran Untuk Penanganan Covid-19 Pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Sebagai dasar upaya penyelamatan ekonomi nasional di masa pandemi ini pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19. Surat Keputusan tersebut disusun berdasarkan atas keadaan yang memaksa Pemerintah dan lembaga terkait untuk segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN maupun APBD khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Pelaksanaan Anggaran Untuk Penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu sudah baik dan berhasil di capai di tahun 2021 adalah merupakan serangkaian proses panjang yang untuk penyusunannya harus dengan sinergi dan tanggung jawab oleh semua komponen di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan hanya pada satu dinas saja sebagai model kasus karena waktu yang terbatas.

Arah Masa Depan Penelitian : Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan

Pelaksanaan Anggaran Untuk Penanganan Covid-19 Pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan dapat memberikan saran dalam perbaikan pengelolaan keuangan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari tanpa bantuan dari pihak lain, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih sebesar-besarnya ke berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis menyadari banyak sekali kekurangan dalam penulisan ini. Oleh sebab itu, penulis dengan terhormat menerima segala kritik dan saran yang dapat memberikan bantuan untuk penulis menjadi lebih baik lagi kedepannya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Wahab, S.A. 2017. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara.
- Arikunto. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moh Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia
- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Anggaran Sektor Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang yang membahas kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 mengenai Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran guna Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, serta Penggunaan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah